

**INDIKASI PATRON - KLIENT DALAM PILKADA PAMEKASAN 2008**

Abdullah Achmad Madani

STEI Masyarakat Madani

Email : [ibnu\\_madani06@yahoo.co.id](mailto:ibnu_madani06@yahoo.co.id)**Abstract**

The study of the kyai is always interesting to discuss, especially when it comes to politics. Because the study of clerics is a multidimensional statement. This means that the study of kyai can not only be seen from one aspect (kyai as a religious figure) but can be seen from other aspects (his views on politics). Therefore, the involvement of the kyai in the political process of the regional head election is inevitable, because the kyai is one of the local elites who can contribute to the process of political learning in democracy. With its charisma is able to provide knowledge to the community in making choices. However, the involvement of the kyai in politics can also have a negative impact on the learning of democratization, because it is not uncommon for the kyai who has close relations with his students to use these weapons to gain significant support that can divert the political choices of their students to win one of the candidates supported by the kyai the. Because the santri relationship with the kyai is not only limited to the world of pesantren, but also has an influence in determining political choices.

Ideally in the realm of Democracy, aspirations should not be represented by elites in direct elections, the people are fully entitled to weigh, evaluate, and propose candidates for regional heads and choose who is suitable and considered worthy of being their leader through the processes and mechanisms that apply. Likewise with the regional head Candidates, their political rights should not be castrated by the existing elite by marginalizing the nominating exchange because they are not included in the nominated deliberations. However, this is not the case in Pamekasan and on the contrary, regional head candidates are determined by the existing elite (kyai) and submitted to political parties. So that regional head candidates do not come out of the conversion process within political parties but are born from external parties. At this point, there seems to be a process of duping because it is assumed that the people cannot choose an appropriate figure as their leader. This mindset is very hurting the course of political development in the country. Today's people are getting smarter, being able to distinguish which leaders are good or not. Therefore in determining the candidates, the people's aspirations should not be taken over by the elite. If this problem continues then it is at this point that the Democratic Fetus has been killed at the hands of the elite.

Keyword : Patron, Klien, Pilkada

**Abstrak**

Kajian tentang kyai selalu menarik untuk dibahas, apalagi jika berkaitan dengan politik. Karena kajian tentang kyai merupakan kajian yang bersifat multidimensional.

Artinya studi tentang kyai tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek saja (kyai sebagai tokoh agama) akan tetapi bisa dilihat dari aspek yang lain (pandangannya dalam berpolitik). Oleh karena itu keterlibatan kyai dalam proses politik pemilihan kepala daerah tidak bisa dihindarkan, karena kyai merupakan salah satu elit local yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran politik dalam berdemokrasi. Dengan kharismanya mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun, keterlibatan kyai dalam politik juga bisa memberikan dampak negative dalam pembelajaran demokratisasi, karena tidak jarang kyai yang mempunyai hubungan erat dengan para santrinya menggunakan senjata tersebut untuk memperoleh dukungan yang signifikan yang bisa mengalihkan pilihan politik para santrinya untuk memenangkan salah satu kandidat yang didukung oleh kyai tersebut. Karena hubungan santri dengan kyai tidak hanya sebatas pada dunia pesantren, melainkan juga mempunyai pengaruh dalam menentukan pilihan politik.

Idealnya di dalam alam Demokrasi, aspirasi tidak boleh diwakili oleh elit didalam pemilihan langsung, rakyat sepenuhnya berhak menimbang, menilai, serta mengajukan calon kepala daerah dan memilihnya siapa yang pantas dan dianggap layak sebagai pemimpinnya melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Begitu juga dengan Calon kepala daerah, hak politiknya tidak boleh dikebiri oleh elit yang ada dengan cara meminggirkan dari bursa pencalonan karena tidak masuk dalam nominasi yang dimusyawarahkan. Namun tidak begitu dengan yang terjadi di Pamekasan dan justru sebaliknya, calon kepala daerah ditentukan oleh elit-elit (kyai) yang ada dan diajukannya kepada partai politik. Sehingga kandidat kepala daerah tidak keluar dari proses konversi didalam partai politik melainkan lahir dari kalangan eksternal elit partai. Didalam titik ini, terkesan ada proses pembodohan karena diasumsikan rakyat tidak bisa memilih figur yang layak sebagai pemimpinnya. Pola pikir demikian sangat melukai jalannya pembangunan politik di tanah air. Rakyat saat ini sudah semakin cerdas, bisa membedakan mana pemimpin yang bagus ataupun tidak. Oleh karenanya dalam penentuan calon, tidak selayaknya aspirasi rakyat diambil alih oleh elit. Jika masalah ini terus berlangsung maka didalam titik inilah Janin Demokrasi sudah terbunuh di tangan para elit.

Kata Kunci : Keyword : Patron, Klient, Pilkada

## **Pembahasan**

Sejarah dan masa depan demokratisasi merupakan dua komponen yang tidak bisa di pisahkan didalam konteks Indonesia. Demokrasi dan demokratisasi di Indonesia berjalan seiring dengan tuntutan masyarakat pasca Reformasi 1998. Hadirnya sistem pilkada langsung diharapkan untuk menghadirkan praktek-praktek dan pendidikan demokratisasi yang lebih baik, sehingga pilkada secara langsung menjanjikan sejumlah harapan. Namun harapan-harapan tersebut tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan yang harus di hadapi. Tantangan atau bias pilkada langsung tersebut diantaranya maraknya praktek politik aliran yang relative sulit untuk dihindarkan, tidak jarang proses dalam

pilkada sering kali diwarnai dengan praktek persekongkolan-persekongkolan antara kandidat dengan para elit. Sehingga tidak mengherankan jika paska pilkada pasangan kandidat yang memenangkan memberikan loyalitasnya yang amat besar kepada para klien politiknya dari pada kepada masyarakat (konstituen).

Bagaimana dengan Pamekasan? Dalam konteks Pilkada Pamekasan menjadi menarik, karena di dalam struktur masyarakat Pamekasan terdapat beberapa elit yang bermain di dalamnya. Meskipun pada kenyataannya di daerah-daerah lain juga tidak jauh berbeda dengan struktur masyarakat di Pamekasan, namun paling tidak ada yang membedakan karena bagaimana peran dominan salah satu elit (Kyai) di pamekasan yang begitu besar yang mendominasi di semua lini kehidupan.

Secara umum didalam kehidupan sosial kemasyarakatan Pamekasan, terdapat beberapa elit di antaranya kyai, birokrasi, pengusaha, pedagang, petani dan yang lainnya. Kyai<sup>1</sup> merupakan elit utama didalam struktur masyarakat Pamekasan dan merupakan suatu figur elit lokal yang disegani karena Ilmu dan Kharismanya<sup>2</sup>, masyarakat pamekasan meyakini kyai sebagai orang yang suci (pewaris nabi), yang berhak dan punya kuasa dalam sosial keagamaan serta memandangnya sebagai elit yang memiliki status, peran dan fungsi yang besar di dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya dalam urusan keagamaan bahkan semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Seperti perkawinan, kelahiran anak, kesuksesan, perdagangan dan lain sebagainya. Karena keahliannya dalam ilmu agama dan jasanya dalam membina umat sehingga menjadikannya pantutan didalam masyarakat.

Kefanatikan masyarakat Pamekasan terhadap figur kyai menimbulkan kultur sosio-politik yang terbangun dalam diri orang madura dan juga tidak terlepas dari kultur sosial kemasyarakatannya yang berkembang. Terdapat 3 ajaran ketundukan dan kepatuhan bagi masyarakat Madura khususnya Pamekasan, yakni : *Ibuh* (kedua orang tua), *Guruh* (guru), dan *Ratuh* (pemerintah)<sup>3</sup>. Guru yang dimaksud disini adalah pemuka dan pemimpin agama Islam (Kyai). Hal tersebut pada akhirnya sangat mempengaruhi

---

<sup>1</sup> Dalam beberapa versi, dalam penulisannya ada yang menggunakan “Kiai dan Kyai”. Tetapi dalam tulisan ini, penulis menggunakan versi yang kedua yaitu “Kyai”. Oleh karena itu bahan bacaan yang dalam penulisannya menggunakan penulisan “Kiai”, didalam tulisan ini disesuaikan kedalam bentuk penulisan “Kyai” sebagai bentuk konsistensi penulisan.

<sup>2</sup>Zamakhshari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren studi tentang pandangan hidup Kyai*. Jakarta. LP3ES Hal 55

pada afiliasi politik mereka. Karena sifat fanatik dan kepatuhannya kepada kyai yang sangat tinggi. Sehingga berimbas pada proses kepartaian. Dari adanya perbedaan partai yang dianut antar kyai membuat masyarakat menjadi galau. Pecahnya pilihan politik kyai di Pamekasan dalam menentukan pilihan partainya yang berimbas pada tataran masyarakat. Karena dalam kondisi apapun masyarakat Madura masih menjunjung tinggi dan memegang erat tuntutan yang mengharuskan menghormati *ibuh, guruh, ratuh*. Dari hal tersebut terlihat loyalitas kyai posisinya lebih utama dibanding pada pemerintah.

Dari hal tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya keberagaman, kompleksitas peran kyai didalam kehidupan masyarakat. Kyai tidak hanya menjadi tokoh dan panutan dalam agama, melainkan juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan politik masyarakat serta dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia.

Focus dalam paper ini adalah ingin mendiskusikan bagaimana pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam hubungannya dengan keterlibatan Kyai dalam Politik, didalam paper ini ada dua komponen besar dalam diskusi paper ini yaitu Kyai dan Masyarakat (Santri). Namun demikian relasi keduanya sepertinya mudah dibayangkan namun agak sulit untuk mendeteksi pola hubungannya. Sehingga rumusan masalah yang mau di angkat didalam tulisan ini adalah *Bagaimana Pola Hubungan Kyai dengan Masyarakat (santri) didalam menentukan pilihan politiknya?*

### **Politik Patron Klien ; suatu Tinjauan Teoritis**

Jika kita berbica tentang istilah patronialime dan klientalisme, ilmuwan sosial selalu merujuk kepada Weber (1947 : 347-358). Menurutnya Patrimonialisme merujuk pada bentuk-bentuk pemerintahan yang didasarkan pada sistem pemerintahan yang berdasarkan kekeluargaan. Mekanisme kekuasaan pemerintahan lebih berbasis pada kekeluargaan, dimana *Patriarchy*, (Father) sebagai patron dan merupakan jantung patrimonialisme.

Jika patrimonialisme sebenarnya meliputi hubungan patron klien, maka klientalisme juga merujuk pada ikatan-ikatan personal antara patron dan kliennya. Ikatan tersebut lebih didasarkan pada pengambilan keuntungan materi antara kedua

---

<sup>3</sup>Ibid Hal 32

belah pihak. Patron akan memberikan pekerjaan, uang kepada kliennya dan mengharapkan adanya ganjaran untuk mendukung dan bekerja sama dengan patron<sup>4</sup>.

Dalam teori ini saya bermula dari Tulisannya James Scott yang memandang Patron-Klien ini merupakan sebuah pertukaran hubungan antara kedua peran. dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan *diadik* (dua orang) yang terutama melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio ekonomi yang lebih tinggi (*Patron*) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dan atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (*Klien*). Pada gilirannya klien membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron<sup>5</sup>. Dalam hubungan ini terdapat pihak yang menempati posisi Superior yang disebut sebagai Patron dan ada pihak yang menempati posisi Inferior yang disebut dengan Klien. Dalam hubungan ini patron selain menggunakan kekuatannya untuk melindungi Kliennya memberikan pekerjaan (menurut Scott) dan bercocok tanam, namun ia juga menggunakan kekuatannya untuk menarik keuntungan atau hadiah sebagai imbalan atas perlindungannya.

Namun Scott<sup>6</sup> mengemukakan ciri-ciri ikatan Patron-Klien sebagai berikut :

1. Terdapat ketidak samaan dalam pertukaran (*inequality of exchange*) yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan kedudukan. Klien adalah seorang yang masuk dalam pertukaran yang tidak seimbang, dimana ia tidak mampu sepenuhnya mengembalikan pemberian Patron, sehingga hutang kewajiban mengikatnya dan bergantung kepada Patron.
2. Adanya sifat tatap muka (*face to face character*), dimana hubungan ini bersifat instrumental yakni kedua belah pihak saling memperhitungkan untung dan ruginya. Meskipun demikian masih terdapat unsur rasa yang tetap berpengaruh karena adanya kedekatan hubungan.

---

<sup>4</sup> Endang S. Soesilowati *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal : Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada*. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal 131

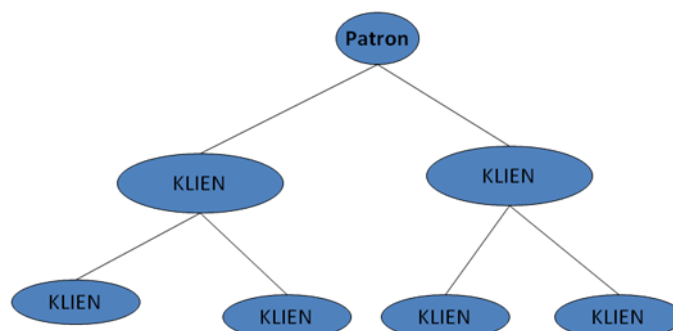
<sup>5</sup> James. C. Scott 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta. Yayasann Obor Indonesia. Hal 7

<sup>6</sup>Ibid

3. Ikatan ini bersifat luwes dan meluas (*diffuse flexibility*), sifat meluas terlihat pada tidak terbatasnya hubungan pada kegiatan kerja saja, melainkan juga hubungan kerja, kedekatan secara turun-temurun ataupun persahabatan dimasa lalu, selain itu terdapat pertukaran bantuan tenaga (jasa) dan dukungan kekuatan selain jenis-jenis pertukaran uang dan barang.

Dari penjelasan tersebut diatas Sehingga dapat disimpulkan bahwa Patron adalah posisi dimana ia mempunyai sumber-sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk melindungi dan memberikan kebutuhan bagi client untuk menciptakan ketergantungan dan kepatuhan. Sedangkan klien memiliki rasa ketergantungan akan bantuan dari pelindungnya yang mendapat pengaruh<sup>7</sup>.

#### Pola Hubungan Patron-Klien



Sumber : Bahan Kuliyah Teori Politik Pertemuan Kuliyah ke IV

#### Patron – Klient ; Pola Hubungan Kyai - Santri

Kajian tentang keterlibatan kyai dalam politik sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya Clifford Geertz<sup>8</sup>, yang meneliti tentang bagaimana seorang Kyai memainkan perannya didalam struktur kemasyarakatan yaitu sebagai pialiang budaya

<sup>7</sup> Bahan Kuliyah Teori Politik Pertemuan Kuliyah ke IV

<sup>8</sup> Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terj. Aswab Mahasin), Pustaka Jaya, Jakarta:

(Cultural broker). Peran tersebut akan hanya dalam urusan keagamaan namun begitu juga dalam urusan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Ia memandang Kyai berperan sebagai alat penyaring atas arus informasi dan globalisasi yang masuk dilingkungan kaum santri, menularkan apa yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan membuang apa yang dianggap merusak masyarakat. Dalam artian bahwa Kyai berperan membendung dampak negatif dan arus budaya luar yang masuk kedalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan penelitiannya Horikoshi<sup>9</sup> dalam penelitiannya di Jawa Barat ia melihat peranan Kyai kreatif dalam proses perubahan sosial. Posisi Kyai yang ditempatkan sebagai posisi penghubung atau kreatif mampu memasuki permainan kekuasaan yang begitu rumit dengan sistem luar yang dominan. Hanya saja keberhasilan kyai dalam memainkan peranannya, sangat tergantung pada kualitas karismanya. Dalam hal ini Kyai berperan sebagai jembatan dan penengah (*Intermediary*). Peran Kyai sebagai wakil masyarakat dalam hubungannya dengan sistem nasional adalah yang terpenting. Masyarakat telah mengabsahkan Kyai sebagai pemimpin dan juru bicara mereka<sup>10</sup>. Adapun Zamakhsyari Dhofier<sup>11</sup> ia membahas tentang usaha yang dilakukan kyai untuk memelihara apa saja yang disebutnya sebagai tradisi pesantren, baik melalui jaringan transmisi ilmu, hubungan saling memasok santri dengan pesantren tertentu, kekarabatan dengan perkawinan dan lainnya. Endang Turmudzi<sup>12</sup> ia menjelaskan dalam bukunya tipologi kyai yang didasarkan pada realitas peranan kyai dalam masyarakat dan relasinya dalam kehidupan secara luas, termasuk dalam relasi dengan politik

Hasil dari beberapa penelitian tentang Kyai tersebut menunjukkan kepada kita bahwa, adanya perluasan peran kyai dalam struktur kemasyarakatan. Kyai bukan hanya sebagai penutan dan pemimpin keagamaan, melainkan juga merupakan factor yang dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Kyai mulai terjun kedalam kekuasaan dan politik praktis. Menurut Khoirudin<sup>13</sup>, Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari keterlibatannya Kyai dalam Politik Praktis ; *pertama* bahwa sumber

---

<sup>9</sup> Horikoshi, 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta

<sup>10</sup> Ibid Hal 234

<sup>11</sup> Zamakhsyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren studi tentang pandangan hidup Kyai*. Jakarta. LP3ES

<sup>12</sup> Endang Turmudi. 2004. *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*. Yogyakarta. Lkis Pelangi Aksara

<sup>13</sup> Khoirudin. 2005. *Politik Kyai Polemik Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis*. Malang. Averroes Press. Hal 46

ajaran islam memiliki lingkup tak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial dan juga menyangkut persoalan politik. *Kedua* dengan posisinya sebagai elit agama, ia memiliki pengikut dan pengaruh yang sangat luas didalam masyarakat. hal itu menyebabkan Kyai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan dan ekonomi. *Ketiga* dari sejarahnya, kyai memiliki peran yang cukup besar dalam politik, hal tersebut bisa dilihat dalam persoalan melawan penjajah hingga beberapa masa kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia di proklamerkan.

Reformasi tahun 1998 juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Perluasan peran kyai didalam masyarakat. Di era Orde Baru, Kyai terpinggirkan posisinya dan tidak determinan dalam proses pengambilan keputusan publik. Pasca Orde Baru, Kyai tidak lagi sekedar penarik suara (*vote-getter*) tetapi sekaligus menjadi pemimpin politik (*elective-political leader*) atau pemain politik (*political player*) yang memiliki posisi tawar (*bargaining-position*) kuat dan menentukan dalam proses politik. Pasca tumbanganya rejim otoriter Orde Baru, beberapa Kyai terpilih menjadi pemimpin politik (*elective-executive political leader*) atau pemain politik (*political player*) yang memiliki posisi tawar yang kuat dalam proses politik. Hal itu antara lain tercermin pada posisi Kyai sebagai presiden ataupun wakil bupati<sup>14</sup>.

Kyai menduduki posisi sentral didalam masyarakat Islam pedesaan dan menyatakan berbagai golongan hingga mampu melakukan tindakan kolektif, jika diperlukan. Dia mengambil peran sebagai poros hubungan antara Umat dengan Tuhan. Pada pandangan sebagian besar pengikutnya, kyai merupakan contoh muslim yang ideal yang ingin mereka capai. Dia adalah seorang yang dianugerahi pengetahuan dan rahmat tuhan. Sifat hubungan antara kyai dengan masyarakat adalah kolektif. Kyai terkesan sebagai pemimpin simbolis yang tak gampang ditiru oleh orang biasa<sup>15</sup>. Masyarakat madura dikenal dengan masyarakat yang taat dalam beragama, segala aspek aktivitasnya selalu disandarkan pada nilai-nilai keagamaan. Masyarakat madura juga

---

<sup>14</sup> Sidik Jatmika Desertasi "*Kyai dan politik lokal*" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah



dikenal dengan masyarakat yang Fanatik terhadap yang berhubungan dengan keagamaan. Kajian tentang kyai selama ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti baik orang barat maupun orang Indonesia itu sendiri.

Selain karena Posisi kyai didalam masyarakat terpandang sebagai Elit keagamaan, juga karena nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, nilai tersebut sudah menjadi budaya didalam masyarakat yang disebut budaya *Patron-Klien*. Dalam konteks kajian ini budaya patron klien yang dimaksud adalah kesanggupan seorang patron (atasan) untuk memberikan kursi, jabatan, serta pekerjaan bagi Klien (bawahannya) dengan imbal jasa bawahan harus memberikan loyalitas serta dedikasinya pada pemberi jabatan atau pekerjaan, melalui bentuk-bentuk upeti, maupun dukungannya.

Bagi masyarakat madura Pamekasan pada khususnya keberadaan Kyai sangat besar pengaruhnya. Setiap gerak kehidupan komunitas masyarakat tidak bisa dilepaskan dari figur seorang kyai. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap warga di Madura khususnya di pamekasan, jika memiliki suatu keperluan baik yang bersifat Ukhrawi maupun Duniawi selalu dimintakan restu kepada kiai. Singkatnya, keberadaan kiai oleh masyarakatnya selalu dikaitkan dengan konsep barokah dan karomah sekaligus laknat dan kutukan. Selain pondok (asrama) dan santri, Kyai merupakan elemen pokok didalam pesantren. kyai menyandang pimpinan (pengasuh) pesantren sehingga sosok Kyai dipandang sebagai bapak oleh santinya, sebagai orang tua yang disegani, dihormati dan dipatuhi dan menjadi sumber petunjuk ilmu pengetahuan bagi santrinya.

Hubungan kyai dengan santrinya adalah hubungan kepercayaan santri terhadap kyainya, karena memiliki kemampuan untuk mendidik, dan dapat mengarahkan santrinya kepada jalan yang baik serta dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam menjalankan kewajibannya tersebut dalam memberikan arahan, bimbingan setra kesetiaannya dan komitmennya pada ajaran agama Islam. Dari sifat saling percaya antara santri dengan kyainya, dan karena faktor kewibawaan kyai dan karena kharismanya tersebut sehingga menjadi nilai dan tradisi didalam pesantren. Nilai-nilai yang terdapat didalam pesantren tersebut melahirkan tiga unsur yang mengarah pada terbentuknya hubungan patron-klien diantara mereka<sup>15</sup>. *Pertama* hubungan Patron-Clien

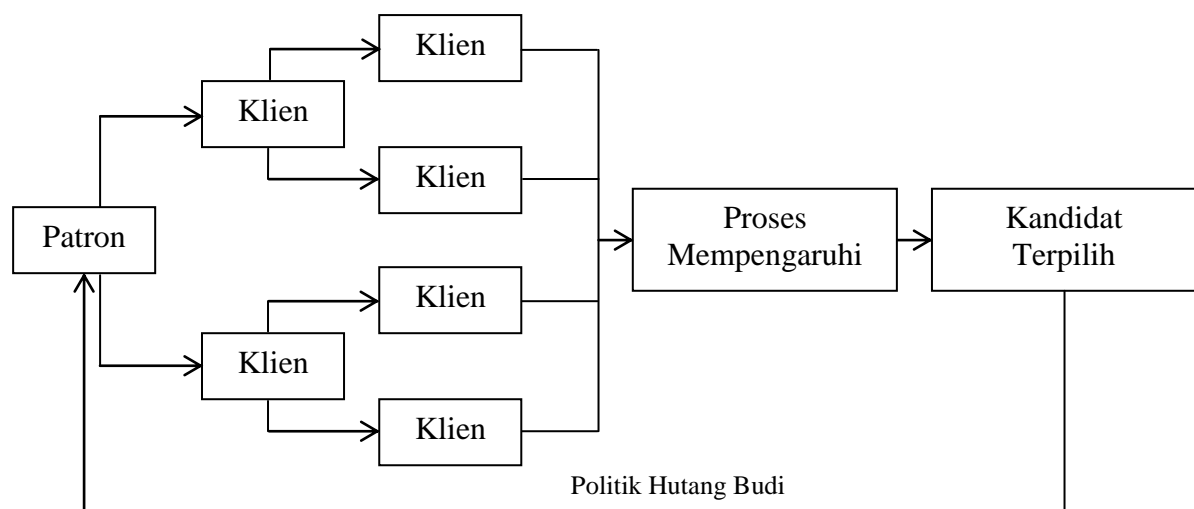
---

<sup>15</sup> Horikoshi, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta, P3M. Hal 232

<sup>16</sup> Sukamto. 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Indonesia: LP3ES. Hal 79

mendasarkan diri pada pertukaran yang tidak seimbang, yang mencerminkan perbedaan status Sebagaimana yang dicirikan oleh Scott pada poin pertama karena Terdapat ketidak samaan dalam pertukaran (*inequality of exchange*) yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan kedudukan<sup>17</sup>. Seorang Klient (santri), menerima banyak jasa dari Patron (Kyai) sehingga Klient terikat dan tergantung kepada Patron. *Kedua* hubungan patron Klient bersifat personal. Pola resiprositas yang personal antara Kyai dan Satrinya menciptakan rasa kepercayaan dan ketergantungan didalam mekanisme hubungan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari budaya penghormatan santri kepada kyai yang cenderung bersifat kultus individu. Hubungan santri-kyai adalah hubungan yang personal dan didukung atas alasan keagamaan. Kyai dimata santri dianggap sebagai bapak, guru bahkan tuan yang disucikan. Segala perintah kyai harus ditaati. Inilah salah satu konci bila seorang santri ingin memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat<sup>18</sup>. *Ketiga* hubungan patron tersebar menyeluruh., fleksibel dan tanpa batas kurun waktunya. Hal ini disebabkan karena sosialisasi nilai ketika menjadi santri berjalan bertahun-tahun. Dari uraian tersebut dapat diperoleh suatu rumusan mekanisme patron klien dalam mempengaruhi pilihan politik sebagai berikut.

### Mekanisme Patron Klien dalam mempengaruhi Pilihan Politik



#### Legal :

- Memberikan pekerjaan kepada orang terdekat
- Penunjukan untuk jabatan Potensial
- Proyek-proyek

#### Illegal :

- Menolak untuk mengkritisi Kebijakan
- Bantuan dan bentuk Hibah

<sup>17</sup> James. C. Scott 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta. Yayasann Obor Indonesia. Hal 7

Dengan melihat table tersebut, politik patron klien dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan Patron terhadap klien untuk memilih calon tertentu dengan janji – janji tertentu yang akan diberikan oleh calon tersebut kepada patron jika calon tersebut memenangkan dalam pemilihan tersebut.

### **Potret Pilkada Pamekasan ; Praktek Patron – Klien dalam memperoleh dukungan**

Pada orde baru dalam pemilihan kepala daerah dan untuk berkuasa serta untuk masuk dalam struktur pemerintahan ditentukan oleh segelintir orang di DPR. Namun pasca orde baru setelah UU no. 22/1999 di revisi menjadi UU no. 32/2004 dan Sebagai produk dari reformasi yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan pemilihan kepala daerah ini dilakukan secara langsung yang otomatis biaya para calon untuk berkuasa bertambah. Namun dalam hal ini rakyat yang sudah mulai cerdas tidak mau dibodohi. Ketika para calon meminta dukungan untuk memilihnya rakyatpun akan menanyakan apa imbalan yang akan diberikan kepadanya.

Essensi dari pemilihan kepala daerah adalah memberikan pendidikan politik dalam pelajaran berdemokrasi kepada masyarakat untuk memilih Pemimpin yang akan memimpin daerahnya dalam kurun waktu tertentu dengan kreteria dan tipe pemimpin yang mereka inginkan. Menurut Herbert Feith *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962)* tipe pemimpin ada dua macam, yang *pertama* pemimpin yang bertipe pengelola (administrator) yaitu mereka yang mempunyai kemampuan teknis dalam mengatur Negara atau daerahnya. Tipe pemimpin yang seperti ini umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh terdidik yang menguasai bidang tertentu. yang pada umumnya cakap dalam mengelola pemerintahan tapi kurang mendapat dukungan dari rakyat, karena kurang menguasai retorika karena tidak memiliki kecakapan yang cukup dalam mendekati massa. Yang *kedua* pemimpin yang bertipe pemersatu adalah orang yang mampu mendekati massa, mempengaruhi mereka serta mendapatkan simpati dan dukungan dari mereka. Umumnya pemimpin bertipe pemersatu ini mampu mengumpulkan dukungan rakyat serta berhasil mempengaruhi mereka, tetapi ketika harus mengelola pemerintahan, dia gagal dan kerap mengecewakan. Dari dua bentuk

---

<sup>18</sup> Khoirudin. 2005. *Politik Kyai Polemik Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis*. Malang. Averroes Press. Hal 34

pemimpinan yang ditawarkan oleh Herbert Feith ini umumnya jarang ditemukan pada diri seseorang yang dimiliki oleh satu orang.

Sedangkan type pemimpin yang ditawarkan oleh William Liddle dalam makalahnya *Marx atau Machiavelli (2001)* ia juga menawarkan 2 bentuk pemimpin, yang *pertama*, Transformasional (*Transforming Leader*) pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik dari suatu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Yang *kedua* Transaksional (*Transactional Leader*) model kepemimpinan yang mempergunakan model kekuasaannya untuk menukar dengan posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Didalam tulisan ini akan mendiskusikan tentang pesta rakyat pamekasan dalam memilih pemimpinnya yang berlangsung pada 5 maret 2008, namun focus dalam tulisan ini adalah berusaha untuk membuka bagaimana perilaku politik elit kyai yang berusaha untuk memenangkan kandidat yang di usungnya dalam mempengaruhi perilaku pemilih.

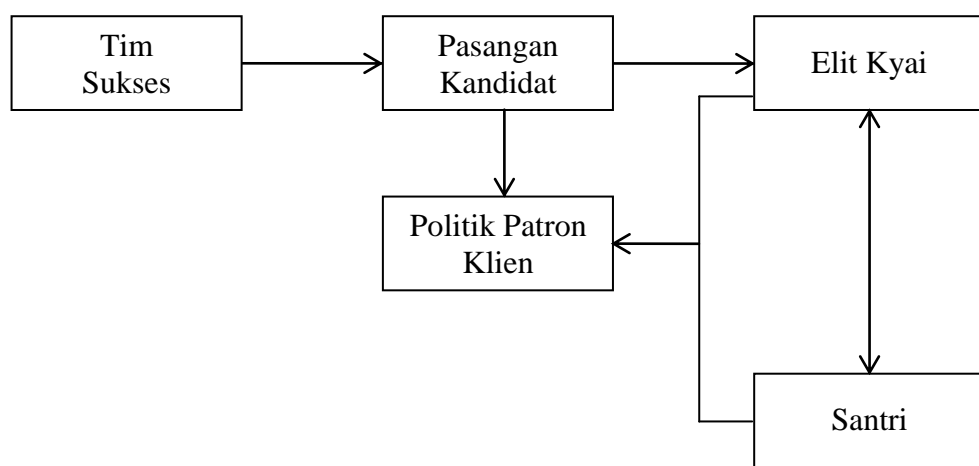
Pilkada Pamekasan berlangsung pada 5 maret 2008. Disini menjadi menarik karena kontestasi untuk memperebutkan menjadi orang nomor satu dipamekasan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Pilkada ini di ikuti oleh tiga pasangan kandidat cabub dan cawabub. KH Kholilur Rahman-H. Kadarisman (*Kondang*), H. Achmad Syafii-Shihabuddin (*Asas*) dan H. Dwiatmo-Supriadi (*Dwiadi*). Masing-masing kandidat ini memiliki jargon politik yang berbeda, bahkan dari latar belakangnya yang berbeda. Mulai dari Kyai, Birokrat, pengusaha sampai politisi. Dalam kandidat cabub dan cawabub tersebut terdapat kandidat yang posisinya adalah sebagai Incumbent yaitu Achmad Syafii sebagai mantan bupati pamekasan dan Kadarisman sebagai mantan wakil bupati. Dan menariknya lagi para kandidat yang posisinya sebagai incumbent ini pecah kongsi, mereka tidak mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati dalam kendaraan yang sama, tidak menjadikan satu pasangan lagi. Sedangkan KH. Kholilur Rahman adalah dari latar belakang Kyai yang ikut berpartisipasi dalam mencalonkan diri dalam pertarungan calon bupati pamekasan untuk mencoba peruntungannya masuk kedalam dunia politik praktis dan ini merupakan pendatang baru dalam praktek demokratisasi lokal dipamekasan.

Disisi lain kajian ini yang menjadi menarik adalah karena gabungan dari dua partai besar yang berkoalisi dengan beberapa partai kecil non parlemen bisa mengalahkan koalisi dari gabungan beberapa partai besar yang menjadi pemilik suara

terbanyak pada pemilihan umum sebelumnya. Sebagaimana informasi yang penulis dapat, pasangan Kondang diusung oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan gabungan dari beberapa partai kecil non parlemen. Sedangkan Asas diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai demokrat (PD), Partai Kebangkitan Nasional Indonesia (PKNU), serta partai-partai kecil non parlemen. Jika dihitung secara rasional Asas akan memenangi kontestasi pemilihan bupati tersebut karena partai pendukungnya mayoritas adalah partai-partai besar yang punya banyak kursi di parlemen. Sedangkan Kondang hanya didukung oleh 2 partai partai besar yang punya kursi di parlemen dan sisanya adalah partai-partai kecil non parlemen.

Lazim kita temui setiap kali menjelang pilkada masing-masing kandidat berupaya untuk memerlihatkan keberpihakannya kepada rakyat dengan memberikan bantuan-bantuan yang bersifat pembangunan atau yang lainnya. Namun berbeda dengan di pamekasan, jika sudah mendekati pilkada marak kandidat berupaya untuk mendekati tokoh elit kyai untuk memperoleh dukungan yang kuat karena rakyat dan kyai ibarat sudah satu tujuan dan satu suara. Menjelang pemilu (dalam hal ini pemilukada) banyak politisi nyabis (soan, datang) kerumah kyai dengan berbagai macam tujuan dan janji-janji politik. Karena kyai dengan otoritasnya mampu mengendalikan seluruh santri, *bindereh*, wali santri serta masyarakat sekitar untuk menyatukan suara dalam perpolitikan khususnya dalam ritual lima tahunan ini. Dibawah kekuasaan kyai mereka tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri yang terbaik menurutnya. Dari uraian tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam praktek patron – klien dalam Pilkada Pamekasan adalah sebagai berikut :

#### **Relasi antara Kandidat, Tim Sukses, dan Elit (Kyai) dalam Politik Patron Klient**



Dari table tersebut bisa menjelaskan bagaimana relasi antar masing-masing actor dengan yang lainnya. Misalnya antara kyai dengan pasangan kandidat dimana kyai memiliki kepentingan terhadap kandidat yang di usungnya dengan memberikan bantuan suara dengan maksud untuk mendapatkan politik utang budi. Relasi antar actor diatas bisa dikatakan sebagai politik patron klien karena adanya keterkaitan langsung antara kyai sebagai patron dan santri sebagai klien yang dapat memberikan suara terhadap kandidat yang diusungnya.

Clifford Geertz dalam bukunya (*The Religion of java*)<sup>19</sup> menjelaskan ada 3 sub kebudayaan jawa yaitu *Santri*, *Priayi*, dan *Abangan* yang ketiga sub kebudayaan tersebut Geertz mengklasifikasikan kedalam struktur sosial yang ada di jawa yang terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai dan upacara yang berkaitan dengan masing-masing struktur sosial tersebut<sup>20</sup>. Konsep trikotomi Geertz tersebut bisa digunakan untuk melihat Tradisi dan Konsep Kebudayaan masyarakat Madura dalam hal ini Pamekasan. *Abangan* merupakan struktur sosial yang berpusat di pedesaan yang menekankan pentingnya aspek-aspek animistik. Dengan Perwujudan citra agama adalah pesta-pesta ritual yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menghalau berbagai mahluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab dari ketidak aturan dan kesengsaraan dalam masyarakat, agar equilibrium didalam masyarakat dapat dicapai kembali. *Santri* berpusat di tempat perdagangan atau pasar dan tempat pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek keislaman. Dan penekanan pada tindakan-tindakan keagamaan dan upacara-upacara sebagaimana digariskan didalam islam. *Priayi* berpusat di kota, dikantor pemerintah yang menekankan pada aspek-aspek kebudayaan hindu. Serta di identik berkaitan dengan atiket, tari-tarian dan berbagai bentuk kesenian, bahasa dan pakaian.

Dari beberapa kandidat yang mencalonkan bupati tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan kondang (Kholil – Dadang). Bupati terpilih merupakan anak dari pasangan KH. Hasan Abdul Wafi dan Nyai Aisyah Zaini. Sejak kecil anak tertua dari sembilan bersaudara ini, akrab dengan pondok pesantren. Meski mendapat

---

<sup>19</sup> Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terj. Aswab Mahasin), Jakarta, Pustaka Jaya

pendidikan salafiyah, pemikirannya kontekstual dengan perubahan zaman. Dia berupaya memadukan pendidikan salafiyah dengan pendidikan modern. Pengaruh pemikiran KH. Hasan Abdul Wafi banyak mempengaruhi pemikiran Kholilurrahman. KH Hasan Abdul Wafi adalah santri langsung dari KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid (pengasuh pondok pesantren Bata-Bata Pamekasan) dan santri langsung dari KH. Baidlowi (Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan).

Oleh sebab itu Kholilurrahman sebagai bupati terpilih merupakan klien dari KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid (pengasuh pondok pesantren Bata-Bata Pamekasan) dan KH. Baidlowi (Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan) yang sekarang diasuh oleh KH Muhammad Syamsul dan merupakan paman dari Kholilurrahman. Riwayat pendidikan dan pekerjaannya serta pertemanannya di pesantren telah menempatkannya sebagai patron sekaligus sebagai klient. Ia telah menjadi klient (bawahan) kyai sejak menjadi santri. Ia sekaligus menjadi awal baginya memupuk dan memperluas jaringan dengan dengan membangun pertemanan semasa tinggal di pesantren. Ia juga sebagai patron bagi bawahannya karena ia juga merupakan seorang kyai. Namun pertanyaannya adalah apakah ada semacam hak dan kewajiban bagi patron untuk kliennya dan sejauhmana itu dilaksanakan? Jika dilihat dalam konteks kemaduraan maka Jawabannya adalah menghormati guru. Mereka tidak meminta apa-apa yang mereka harap bisa membangun Pamekasan tanpa KKN.

Untuk memperoleh dukungan dari para pengikutnya (para santri-santrinya) sebagai klient, tidak jarang kyai menggunakan dalil-dalil keagamaan. Orientasi ideologis kyai terlibat kedalam praktek politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, dengan istilah yang dipakai adalah untuk mewujudkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keberhasilan kondang dalam memenangkan kontestasi untuk memperebutkan pamekasan no 1 ini adalah tidak lepas dari dukungan maksimal para kyai baik dari Pondok pesantren Bata-bata maupun Banyuanyar yang memiliki Jamaah, pengikut (Santri) sebagai patron yang banyak dengan memegang teguh konsep *sami'na wa atho'na* terhadap perintah para kyai. Ketika pilihan politik para kyai tersebut jatuh pada pasangan Kondang (Kholil –

---

<sup>20</sup> Ibid Hal VII

Dadang), maka semua pengikutnya sebagai klien akan loyal dan terhadap pilihan politik kyai sebagai patronnya.

Secara umum, sebagai elit didalam masyarakat, para kandidat tersebut mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam penegakan demokratisasi lokal di Pamekasan. Mereka berpartisipasi dalam pencalonan calon bupati dan calon wakil bupati dengan tujuan untuk mewujudkan pendidikan politik lokal dipamekasan. Pilkada merupakan pendidikan politik bagi masyarakat pamekasan. Pilkada 5 maret 2008 ini berlangsung serentak di 1.352 tempat pemungutan suara yang tesebar di 189 desa dengan jumlah penduduk sekitar 597.562 sedangkan masyarakat yang berpartisipasi 470.430 dan 127.222 golput<sup>21</sup>.

**Tabel : Perolehan suara masing-masing pasangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pamekasan 5 Maret 2008.**

Kondang		Asas		Dwiadi	
Kecamatan	Suara	Kecamatan	Suara	Kecamatan	Suara
Tlanakan	14.518	Tlanakan	12.584	Tlanakan	6.031
Pademawu	12.957	Pademawu	18.310	Pademawu	16.351
Galis	5.241	Galis	7.648	Galis	5.570
Larangan	12.760	Larangan	13.172	Larangan	7.669
Pamekasan	15.237	Pamekasan	23.142	Pamekasan	10.887
Proppo	19.145	Proppo	16.074	Proppo	6.053
Palengaan	25.119	Palengaan	17.552	Palengaan	1.436
Pegantenan	23.555	Pegantenan	12.891	Pegantenan	1.451
Kadur	15.643	Kadur	10.081	Kadur	2.004
Pakong	12.990	Pakong	7.904	Pakong	667
Waru	21.106	Waru	12.414	Waru	1.189
Batumarmar	30.801	Batumarmar	8.670	Batumarmar	1.459
Pasean	19.664	Pasean	9.701	Pasean	2.050
<b>Total</b>	228.736	<b>Total</b>	170.080	<b>Total</b>	62.817

*Sumber KPUD : Kabupaten Pamekasan 2008<sup>22</sup>*

Sebagian dari kecamatan yang ada di Pamekasan terdapat beberapa kecamatan yang masih primitif dan tingkat intelektualitas masyarakatnya dibawah tingkat

<sup>21</sup> Jurnal M. Imam Zamroni. *Agama, Etnis dan Politik dalam Panggung Kekuasaan (sebuah Dinamika Politik Tauke dan Kyai di Madura)*. Hal 16

<sup>22</sup> KPUD Kabupaten Pamekasan 2008



intelektualitas kecamatan yang lain. Diantaranya adalah kecamatan *Palengaan*, *Pegantenan*, *Waru*, *Batumarmar*, dan kecamatan *Pasean*. jika diklasifikasikan kedalam konsep trikotomi yang ditawarkan oleh Geertz, kecamatan-kecamatan tersebut masuk kedalam kelompok *abangan*. Karena mayoritas masyarakat didalam kecamatan tersebut masih mempercayai pada kekuatan-kekuatan ghaib dan animistik serta masih percaya pada kekuatan supranatural. Mereka mempercayai bahwa ajaran islam mengharuskan umatnya untuk berikhtiar dan berusaha dalam menjalani hidupnya meskipun kadang-kadang ikhtiar tersebut menyimpang dengan ajaran yang mereka anut. Umumnya pemuda di Kecamatan tersebut di Mondokkan untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama dan mengharap barokah dari sang kyai.

Para elit Kyai di Pamekasan memiliki basis dukungan yang sangat kuat yang notabene adalah para santri-santrinya baik yang masih tinggal dipesantren maupun yang sudah keluar dari pesantren yang sudah menjadi alumninya. Dalam memperoleh dukungan dari pengikutnya, elit kyai ini seringkali menggunakan dalil-dalil agama yang berasal dari al-quran dan al-hadits yang merupakan sumber-sumber ajaran agama Islam. Kefanatikan masyarakat Pamekasan pada sosok dan figur seorang kyai dan pesantrennya serta pada ajaran-ajaran agama islam dapat dimanfaatkan oleh para elit kyai ini, karena para elit kyai ini dipandang oleh pengikutnya sebagai elit agama yang sangat berpengaruh guna menciptakan suatu keputusan demi kemaslahatan ummat didalam kehidupan masyarakat.

Selain karena Posisi kyai didalam masyarakat terpandang sebagai Elit keagamaan, juga karena nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, nilai tersebut sudah menjadi budaya didalam masyarakat yang disebut budaya *Patron-Klien*. Dalam konteks kajian ini budaya patron klien yang dimaksud adalah kesanggupan seorang patron (atasan) untuk memberikan kursi, jabatan, serta pekerjaan bagi Klien (bawahannya) dengan imbal-jasa bawahan harus memberikan loyalitas serta dedikasihnya pada pemberi jabatan atau pekerjaan, melalui bentuk-bentuk upeti, maupun dukungannya.

Dari uraian diatas terlihat bahwa meskipun pilkada pamekasan yang menurut banyak komentar dari berbagai kalangan, adalah pilkada yang demokratis, transparan dan bersih, namun jika dilihat dari cara-cara timsukses direkrut dan kelompok-kelompok pendukungnya masih ada indikasi patrimonialisme dan klientalisme.

## Kesimpulan

Proses pilkada yang telah berlangsung di Pamekasan diyakini oleh banyak pihak sebagai bentuk demokratisasi dan bentuk pilkada yang demokratis. Namun pertanyaannya adalah jenis demokrasi yang bagaimanakah yang dimaksud? Apakah demokrasi sudah merupakan dan sesuai dengan demokrasi representative dan sudah menunjukkan proses demokrasi yang sudah sesuai dengan konsep pemilihan umum? Namun nampaknya, hal tersebut masih belum terwujud karena proses dalam pilkada tersebut tidak bisa di punggiri telah diwarnai oleh beberapa penyimpangan-penyimpangan yang merupakan bukan kaidah dari pemilihan umum yang LUBER seperti intrik kolusi yang bernuansa Primordial dan minimnya perilaku demokrasi, baik pada tataran penyelenggara maupun pada kalangan masyarakat sendiri. Akibatnya proses politik dalam pilkada tersebut dipenuhi oleh kompromi-kompromi kepentingan para elit.

Kemenangan pasangan kondang pada pemilihan bupati pamekasan 2008 tidak lepas dari peran besar yang didukung oleh para kyai-kyai besar di Pamekasan. Khususnya yang memiliki pondok pesantren besar yang secara otomatis mempunyai santri dan pengikut yang jumlahnya tidak sedikit. Antara lain pondok pesantren Bata-bata, Palengaan, Banyuanyar dan panyeppeen. Yang para kyai-kyai tersebut mempunyai pengaruh dan kemampuan yang luarbiasa sehingga bisa meyakinkan kepada para pengikutnya untuk menyatukan suaranya dalam pemilihan bupati tersebut, meskipun kadang-kala dengan menggunakan segala cara untuk dapat memenangkannya.

## Daftar Pustaka

- Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terj. Aswab Mahasin), Jakarta, Pustaka Jaya
- Endang S. Soesilowati *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal : Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada*. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Horikoshi, 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta
- James. C. Scott 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta. Yayasann Obor Indonesia.
- Khoirudin. 2005. *Politik Kyai Polemik Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis*. Malang. Averroes Press.

Sidik Jatmika Desertasi "*Kyai dan politik lokal*" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU  
Kebumen, Jawa Tengah

Sukanto. 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Indonesia: LP3ES.

Zamakhsyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren studi tentang pandangan hidup Kyai*.  
Jakarta. LP3ES

**Referensi Lain :**

Jurnal M. Imam Zamroni. *Agama, Etnis dan Politik dalam Panggung Kekuasaan*  
(sebuah *Dinamika Politik Tauke dan Kyai di Madura*).

Bahan Kuliyah Teori Politik Pertemuan Kuliyah ke IV

KPUD Kabupaten Pamekasan 2008